

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARA KPUD BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN LABUHAN BATU 2015**

\* **Fajar Adhari Tambunan**<sup>1)</sup>, **Heri Kusmanto**<sup>2)</sup>, **M. Arifin Nasution**<sup>3)</sup>

1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

### **Abstrak**

Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota adalah proses penyampaian informasi mengenai system, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilihan serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Besarnya anggaran untuk sosialisasi pada setiap pemilihan umum meskipun sudah capai target untuk mendulang suara para pemilih setiap kali adanya pemilihan namun itu masih jauh dari harapan. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi setiap penyelenggara pemilu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan kajian terhadap bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPUD terkait dengan efektivitas pelaksanaan sosialisasi penyelenggara bagi pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu 2015. Metodologi yang digunakan yaitu metode deskriptif (*Descriptive Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Kata Kunci:** Efektifitas; Sosialisasi; Pemilih Pemula.

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan berfungsi sebagai alat menegakkan dan menyempurnakan demokrasi. Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Sejak 1955, Indonesia telah menyelenggarakan 11 pemilu. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kekuasaan. Dalam sudut pandang tatanegaraan, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan

yang mengemban amanah rakyat. Menurut srisoemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk didalamnya (Koirudin, 2004).

Tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok-seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan. Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara (Chilcote, 2004).

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Yang diharapkan adalah agar Komisi Pemilihan Umum sebagai ujung tombak penyelenggara pemilihan umum. Baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun legislatif. Untuk itu Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi yang mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel. Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian setiap warga negara dapat terjamin menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota adalah proses penyampaian informasi mengenai system, tata

cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilihan serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Besarnya anggaran untuk sosialisasi pada setiap pemilihan umum meskinnya sudah capai target untuk mendulang suara para pemilih setiap kali adanya pemilihan namun itu masih jauh dari harapan. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi setiap penyelenggara pemilu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan kajian terhadap bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPUD terkait dengan efektivitas pelaksanaan sosialisasi penyelenggara bagi pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu 2015.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi *pragmatism* (Assiddiq, 2014).

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elite politik yang membuat keputusan. Milbrath Dan Goel (Hanif, 2005) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktifis masyarakat. Partisipasi politik menurut *Rosseau* terdiri atas dua jenis. Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen (Pito et al., 2005).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah (Koirudin, 2004).

Selain itu faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Artinya tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang dimaksud status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak

hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. Partisipasi politik yang rendah dikalangan pemilih pemula akan menyebabkan kerentanan terhadap peningkatan jumlah golput.

Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses Pemilihan Umum. Menurut Plano Jack dalam (Hanif, 2005), perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. Huntington dan Nelson (1994) dalam (Pito et al., 2005) menyebutkan sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (voting), bantuan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses Pemilihan Umum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, menurut Surbakti yaitu :

- a) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi dan budaya.
- b) Lingkungan sosial politik langsung seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan
- c) Struktur kepribadian yang tercermin dari sikap individu

Dari lingkungan sosial politik langsung, masyarakat mengalami sosialisasi langsung dan internalisasi nilai dan norma masyarakat termasuk nilai, norma kehidupan bernegara dan pengalaman hidup pada umumnya. Selain itu, faktor sosial politik tak langsung juga berperan dalam mempengaruhi sosial politik langsung. Dengan kata lain bahwa sosialisasi, internalisasi akan mempengaruhi individu atau masyarakat dalam menentukan perilaku politik. Sosialisasi politik merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik khususnya pemilih pemula. KPU/KPUD adalah lembaga resmi negara yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pemilu untuk menghindari golput dalam jumlah yang besar.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif (*Descriptive Research*) menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa: Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Fokus penelitian merupakan objek kajian yang menjadi titik perhatian kegiatan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah tentang efektivitas program sosialisasi penyelenggara bagi pemilih pemula pada pilkada di Kabupaten Labuhanbatu 2015. Untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada 2015.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk melihat persepsi pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis persepsi pemilih khususnya pemilih pemula, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional (Kavanagh, 1983).

### **1. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial (Kavanagh, 1983). Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Persepsi pemilih pemula di sekolah dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya pada pemilu 2014 umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian karena hampir semua informan yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon sama dengan pilihan orang tuanya (Subekti, 2014).

Pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilihan. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan yaitu Rahmad yang,

menyatakan: “Pemilukada 2015 yang lalu saya memberikan suara dan menjatuhkan pilihan saya kepada calon tersebut karena orang tua juga demikian”. Berdasarkan pernyataan diatas yang di kemukakan oleh Rahmad dan Rina menunjukkan persepsi yang ikut-ikutan. Persepsi ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keuarga dan orangtua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik dan benar bagi mereka serta adanya pengaruh lain dan informasi yang didapatkan cukup terbatas. Hal demikian lebih lanjut diutarakan oleh Rahmad bahwa “Hanya beberapa calon calon yang saya ketahui, itupun tidak tahu secara mendalam sehingga tidak melihat secara keseluruhan mana yang berpotensi dan baik untuk saya pilih sebagai pemimpin.

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih pemula tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin yang cocok dengan mereka. Selain itu persepsi ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih pemula untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, persepsi tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya. Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper Efriza (2012) dalam (Nur Wardhani, 2018) predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan persepsi memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dsb. Namun,

Persepsi demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian

menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah. Selain dari penjelasan diatas Gerald Pomper di atas, pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan sikap termasuk pembentukan sikap politik anak- pertama kali di lingkungan keluarga. Sejalan dengan itu, Dalam penelitian ini tidak banyak diantara pemilih pemula yang preferensi pilihannya sama dengan orang tuanya karena faktor ikut-ikutan tapi juga karena mendapat arahan/desakan dari orang tuanya. Mereka ikut berpartisipasi itu karena arahan/desakan orangtua untuk memilih calon yang sama dengan orangtuanya. Seperti yang diutarakan oleh Dini, menyatakan bahwa: “sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilukada namun karena orang tua mengajak untuk memilih calon yang mereka pilih maka saya ikut saja.” Tidak berbeda dengan yang diutarakan Irwan, menyatakan bahwa: “saya sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilukada. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang calon”

Dari petikan pernyataan di atas yang di utarakan Dini bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya kerana tidak tahu-menahu menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. Model persepsi ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senangtiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini persepsi pemilih pemula ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Menurut penulis, persepsi pemilih pemula di Sekolah ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih

pemula menyerap informasi berupa isu-isu tema dan calon lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dll. Lebih lanjut menurut penulis, bahwa adanya pemilih pemula yang yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang calon menunjukkan tipe Apatis mereka. tipe ini menunjukkan persepsi acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

## **2. Pendekatan Psikologis**

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya (Kavanagh, 1983), yaitu: identifikasi partai, orientasi calon, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik (Subekti, 2014). Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis (Budiardjo, 2008).

Namun, figur calon yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih pemula, Mengingat kecenderungan pemilih pemula menjatuhkannya pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan. Sebagaimana yang yang di ungkapkan seorang informan Surya ketika diwawancarai: bahwa Pemilukada 2015 wajib disukseskan, oleh karena itu wajib sebagai pemilih untuk ikut memilih. Apalagi ada calon yang “jagoan” saya yang ikut menjadi calon”. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya persepsi yang psikologis pada pemilih pemula. Dimana pemilih pemula menjatuhkannya pilihan pada figur calon yang mereka idolakan. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan persepsi model ini. Menurut penulis, adanya persepsi psikologis ini tidak kedekatan pemilih pemula terhadap figur calon yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang calon adalah hasil evaluasi terhadap calon. Evaluasi terhadap calon sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu calon baik dalam kehidupan bernegara maupun

bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang calon, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi, dan integritas calon (Bello, F.G., Lovelock, B., Carr, 2017). Sebagaimana penilaian yang diutarakan oleh salah satu informan Siti, menyatakan: “saya lebih memilih calon yang sudah terbukti mampu memimpin dan selain itu, Saya lebih mengenal calon tersebut di bandingkan dengan calon lainnya karena karna memang dia memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik” Pernyataan di atas jelas menggambarkan adanya evaluasi terhadap calon. Dimana telah dibahas sebelumnya bahwa evaluasi terhadap calon ini karena sejarah atau masa lalu calon. Hal ini yang kemudian mempengaruhi penilaian pemilih terhadap calon. Pernyataan di atas menunjukkan adanya ikatan emosional dari pemilih terhadap kandidat. Menurut penulis penilaian siswa-siswa disekolah memilih kandidat karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang ia terima. Menurut penulis, dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

### **3. Pendekatan Pilihan Rasional**

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkebang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan dalam menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya (Kavanagh, 1983).

Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut

dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ridwan ketika diwawancarai menyatakan: “saya memilih karena ada beberapa hal, yaitu karena kandidat/calon tersebut memiliki banyak penghargaan, sudah terbukti memiliki kepemimpinan yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya membangun daerah”

Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Taufik menyatakan: “katanya visi-misi yang ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam pertanian, dan daerah kita adalah daerah pertanian, saya sangat suka dengan programnya” Pernyataan yang sama juga diutarakan informan lainnya. Berikut petikan jawaban yang diutarakan oleh Rani menyatakan: “menurut saya pemimpin yang baik selama menjabat periode di tahun lalu yang sudah melakukan banyak perubahan dari berbagai bidang, seperti ada perbaikan jalanan dsb”

Ketika petikan di atas yang diungkapkan oleh Ridwan, Taufik dan Rani secara independen menjatuhkan pilihannya dengan alasan rasional. Disinilah kita dapat melihat adanya persepsi yang rasional pada pemilih pemula. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Menurut (Surbakti et al., 2014) yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya. Dengan melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara *retrospektif*, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pertanyaan lebih lanjut diberikan kepada informan mengenai apakah pada saat pemilihan mereka pernah memperoleh imbalan berupa uang atau barang-barang dari calon maupun tim sukses calon tersebut. Pertanyaan ini terkait, konsep pilihan rasional

yang menjelaskan bahwa pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Dalam kalangan pemilih pemula tidak ada keuntungan secara objektif yang mereka dapatkan. Sebagaimana yang diutarakan Taufik ketika diwawancarai menyatakan: “tidak ada sama sekali. Tidak ada politik uang saat pemilihan. Saya memilih pilihan saya bukan karena uang atau barang, saya tidak akan menjual suara. Saya memilih karena memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin”

Pernyataan lain yang diutarakan Rani menyatakan: “saya memilih memang karena memang sudah waktunya untuk memilih tanpa adanya imbalan dari calon manapun juga kandidat yang menjadi pilihan saya. Saya memilih seorang karena melihat kandidatnya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pemilih pemula tidak pernah menerima uang, barang, maupun berbagai bentuk jasa yang ditawarkan oleh calon pada saat pemilihan, saat pemilihan juga tidak ada terjadi politik uang dan barang dimana para informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima apapun dari calon kandidat pada Pemilu 2015. Pemilih pemula dalam memilih tidak tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi- misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada satu model persepsi yang lebih cenderung ditunjukkan pemilih pemula yakni tingginya preferensi politik keluarga. Kecenderungan ini didasari karena hampir semua pemilih pemula yang diwawancarai mengalami hal tersebut. Sebagaimana petikan wawancara dengan Rani, menyatakan: ”sama. saya sekeluarga memilih satu kandidat. Bapak, mama, dan dua kakak saya sama-

sama memilih parpol tersebut” Pernyataan di atas menunjukkan adanya kesamaan pilihan di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan uraian dalam pendekatan sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilu, yang secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat dalam beberapa lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Hasil penelitian peneliti pemilu yang mengacu kepada Lazarsfeld adalah memberikan suara dalam pemilu pada dasarnya adalah suatu pengalaman kelompok. Perubahan perilaku pemilu seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosial individu tersebut. Pengaruh terbesar berasal dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat erat individu terkait. Menurut pandangan peneliti-peneliti dalam studi ini, sebelum pemilu diadakan masing-masing anggota diikat kepada predisposisi kelompoknya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 memiliki wewenang untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh segmen pemilih termasuk pemilih pemula. Dalam proses sosialisasinya tersebut KPU Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan semua tahapan kegiatan dan mengajak semua yang terkait untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015. Proses sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten labuhanbatu menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, rasional, aktif dan kritis juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015. Dalam melaksanakan sosialisasi peraturan dan mekanisme Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 terdapat kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Labuhan

Batu yakni kendala sumber daya manusia KPU Kabupaten Labuhan Batu yang belum mampu memprogram kegiatan sosialisasi lebih inovatif dan efektif bagi peningkatan kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula.

## **REFERENSI**

- Assiddiq, J. (2014). *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Bello, F.G., Lovelock, B., Carr, N. (2017). Constraints of community participation in protected area-based tourism planning: the case of Malawi. *Journal of Ecotourism*, 16(2), 131–151. <https://doi.org/10.1080/14724049.2016.1251444>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Chilcote, R. (2004). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. George Allen & Unwin.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menebar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Startegi, Dan Peluang*. Airlangga.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. (2005). *Mengenal Teori - Teori Politik*. Kolofon.
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (studi Trun of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, 1.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). Integritas Pemilu 2014 : Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.